

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam proses perkembangannya, setiap individu terkadang mengalami suatu hambatan. Hambatan yang terjadi pada suatu individu beragam jenisnya. Beberapa jenis hambatan tersebut ialah individu yang kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, hambatan dalam perkembangan intelektual serta gangguan motorik (Sugiarmin & Heryati, 2009). Keadaan seperti itulah yang mengakibatkan seseorang mengalami kesulitan dan ketidakmampuan (*disability*) yang diakibatkan oleh suatu *impairment* (kecacatan). Penyandang disabilitas itu sendiri terdiri atas beberapa jenis, diantaranya adalah tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa. Dari jenis-jenis disabilitas tersebut, individu yang mengalami cacat fisik atau penyandang tunadaksa memiliki pandangan yang paling berbeda terhadap dirinya, karena jika dibandingkan dengan ketunaan yang lain, penyandang tunadaksa memiliki ciri fisik yang terlihat sangat jelas atau nampak (Feist & Feist dalam Anggraini, 2012).

Tunadaksa diartikan sebagai suatu keadaan dimana kondisi yang menghambat kegiatan individu akibat kerusakan atau gangguan pada tulang dan otot menyebabkan berkurangnya kapasitas normal individu untuk mengikuti pendidikan dan untuk berdiri sendiri (Somantri, 2007). Menurut Lewis (Tentama, 2010) kondisi kecacatan pada penyandang tunadaksa seringkali dihadapkan pada kenyataan bahwa dirinya berbeda dengan individu yang lain yang tidak menyandang cacat. Anak yang mengalami keterbatasan fisik terkadang memiliki kesempatan yang lebih sedikit untuk bermain dan mengembangkan hubungan dengan teman sebayanya. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan dalam mobilitas, komunikasi,

kemampuan untuk mengikuti sebuah kegiatan, atau bahkan karena keterbatasan secara kognitif (Lewis, 2003:181).

Data Susenas tahun 2003 menunjukkan jumlah penyandang cacat di Indonesia mencapai angka 1,48 juta, dimana jumlah tersebut merupakan 0,7% dari jumlah total penduduk Indonesia secara keseluruhan (sumbarprov.go.id, 2003). Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, Petrus S Manuk mengungkapkan bahwa jumlah penyandang cacat tertinggi hingga 2007 terdapat di Provinsi Jawa Barat, yaitu sekitar 50,90 persen dari total 299.203 jiwa. Data tersebut berdasarkan hasil pendataan (survei) PT Surveyor Indonesia (Persero) dari 9 provinsi dengan jumlah penyandang cacat terbanyak di Indonesia (www.beritasatu.com). Dari banyaknya jumlah penyandang cacat di provinsi Jawa Barat, data Disdik Jabar tahun ajaran 2009/2010 mencatat baru 16.000 penyandang cacat yang mengenyam pendidikan formal. Penyandang cacat yang mendapatkan pendidikan formal tersebut berada di 304 sekolah luar biasa yang ada di Jawa Barat. Selain itu, saat ini sebanyak dua ratus sekolah telah terdaftar sebagai sekolah inklusi, dimana sebagian besar penyandang cacat yang masuk sekolah tersebut adalah penyandang tunadaksa atau tunarungu.

Dari jumlah penyandang cacat yang telah mendapatkan pendidikan formal tersebut, tentunya tidak sembarang sekolah yang dapat menampung seluruh anak tersebut. Menurut para ahli, terdapat beberapa ciri sekolah yang harus diperhatikan untuk menampung anak yang memiliki kebutuhan khusus atau penyandang cacat, diantaranya adalah tidak diskriminatif, fasilitas belajar dan lingkungan yang memberi kemudahan dan rasa aman kepada setiap anak, sarana fisik sekolah yang memudahkan anak (aksesibel), serta guru bekerja dalam tim (Sukinah, 2010). Oleh karena itu, banyak hal yang harus diperhatikan terkait banyaknya ciri yang harus dimiliki oleh sekolah yang siap menampung siswa dengan kebutuhan khusus.

Berdasarkan wawancara permulaan yang dilakukan peneliti terhadap beberapa guru dan orangtua murid, diperoleh gambaran bahwa SLB (Sekolah Luar Biasa) dianggap sebagai pilihan yang tepat untuk memberikan pendidikan terhadap anak yang mengalami kecacatan. Penelitian yang dilakukan di Kuningan Jawa Barat tahun 2010 lalu menunjukkan bahwa guru SD di kabupaten tersebut memilih SLB sebagai tempat mendidik anak-anak dengan kebutuhan khusus yang tergolong tingkat sedang hingga berat dikarenakan permasalahan tersebut tidak berkaitan langsung dengan masalah akademik (Herlina, 2010).

Namun pada akhir 2013 lalu, pemerintah Provinsi Jawa Barat mendeklarasikan Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi inklusif atau daerah yang pendidikannya berusaha menjangkau semua individu tanpa kecuali (Metro tv news, 2013). Dalam pendeklarasian tersebut, disebutkan bahwa paradigma pendidikan inklusif identik dengan penegakan hak asasi manusia dimana sistem pelayanan pendidikan menghargai semua anak.

Dalam hal ini, Johnsen & Skjorten (2001:48) menerangkan pengertian umum mengenai inklusi, yaitu dalam lingkungan masyarakat inklusif, individu tidak lagi dituntut untuk menyesuaikan diri dengan seting yang ada, melainkan diberlakukannya penyesuaian sistem, lingkungan, serta aktivitas semua orang dengan mempertimbangkan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, dengan adanya pendeklarasian mengenai provinsi inklusif, diharapkan setiap individu baik yang mengalami maupun tidak mengalami suatu kecacatan dapat berjalan beriringan untuk sama-sama mendapatkan haknya memperoleh pendidikan agar dapat mengoptimalkan kemampuan yang dimilikinya.

Penelitian mengenai integrasi sosial dan konsep diri pada siswa berkebutuhan khusus dalam kelas inklusif pernah dilakukan di Catalonia, Spanyol. Bahasan dalam penelitian ini ialah mengevaluasi tingkat integrasi sosial siswa yang berkebutuhan khusus di kelas, serta menggali hubungan antara integrasi sosial dan

konsep diri dengan melakukan perbandingan pada siswa yang tidak berkebutuhan khusus di kelas tersebut. Penelitian ini dilakukan pada 97 siswa berkebutuhan khusus yang memiliki masalah pada pendengaran, penglihatan, motorik, hambatan belajar dan retardasi mental. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini menunjukkan adanya hasil positif pada konsep diri siswa berkebutuhan khusus terutama pada dimensi sosial dan akademik, meskipun lebih rendah jika dibandingkan dengan teman sekelasnya yang tidak berkebutuhan khusus (Cambra & Silvestre, 2003).

Dalam optimalisasi kemampuan individu, faktor internal juga dapat berpengaruh pada proses pencapaian kemampuan tersebut. Salah satu faktor tersebut adalah *self-acceptance* (penerimaan diri). *Self-acceptance* atau penerimaan diri diartikan Supratiknya (1995) berupa adanya penghargaan diri yang tinggi dan tidak bersikap sinis terhadap dirinya sendiri. Pengertian *self-acceptance* ini juga memiliki kaitan yang cukup erat dengan kemauan untuk membuka diri dalam mengungkapkan perasaan, pikiran, serta reaksi dan penerimaan terhadap orang lain. Dengan adanya kemampuan dalam menerima diri, tentunya akan berdampak positif untuk menjalani kehidupan ini. Penyesuaian pribadi maupun sosial yang baik berasal dari sikap menerima diri sendiri dan penerimaan orang lain (Hurlock, 1980).

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah gambaran penerimaan diri (*self-acceptance*) pada remaja penyandang tunadaksa. Penelitian ini dilakukan pada tiga orang remaja yang merupakan penyandang tunadaksa dan memiliki kelainan pada sistem otot dan rangka (*musculus skeletal system*). Ketiga remaja tersebut bersekolah di sekolah umum.

C. Pertanyaan Penelitian

Keterbatasan fisik yang dimiliki suatu individu sejatinya tidak akan menghambat individu tersebut untuk mendapatkan pendidikan. Untuk membentuk sikap mental yang kuat pada individu yang mengalami kecacatan fisik, dibutuhkan kepercayaan, dukungan, dan penerimaan dari lingkungan terlebih dari dirinya sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai “Bagaimana gambaran penerimaan diri (*self-acceptance*) pada remaja penyandang tunadaksa?”

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran penerimaan diri (*self-acceptance*) pada remaja penyandang tunadaksa.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pengetahuan mengenai gambaran penerimaan diri (*self-acceptance*) pada remaja penyandang tunadaksa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu psikologi, khususnya dalam bidang Psikologi Perkembangan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi siswa remaja (usia 12-21 tahun), diharapkan melalui penelitian ini siswa dapat menerima keadaan yang dialaminya dengan cara memaksimalkan potensi yang ia miliki serta meningkatkan eksistensi yang ada pada dirinya.

- b. Untuk para guru atau pendidik, melalui penelitian ini diharapkan mampu mengamati penerimaan diri anak dan memberikan berbagai macam bentuk dukungan, baik itu sikap maupun layanan pendidikan integrasi menuju pendidikan inklusif agar anak mampu mendapatkan haknya dalam dunia pendidikan dan interaksi sosial.

F. Sistematika Penulisan

Berikut merupakan sistematika penulisan dalam penulisan skripsi ini:

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Fokus Penelitian

C. Pertanyaan Penelitian

D. Tujuan Penelitian

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
2. Manfaat Praktis

F. Sistematika Penulisan

BAB II: KAJIAN TEORITIS

A. Tunadaksa

1. Definisi tunadaksa
2. Klasifikasi tunadaksa
3. Penyebab tunadaksa
4. Hambatan pada tunadaksa
5. Kebutuhan tunadaksa

B. Remaja

1. Definisi remaja

2. Tugas Perkembangan masa remaja

3. Karakteristik masa remaja

C. *Self-Acceptance*

1. Definisi *Self-Acceptance*

2. Aspek-aspek *Self-Acceptance*

3. Faktor-faktor *Self-Acceptance*

4. Dampak Penerimaan Diri

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

B. Subjek Penelitian

C. Instrumen Penelitian

D. Teknik Pengumpulan Data

E. Teknik Analisis Data

F. Teknik Analisis Keabsahan Data

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian dan Pembahasan Subjek A

1. Profil Subjek A

2. Hasil Penelitian

3. Pembahasan

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan Subjek B

1. Profil Subjek B

2. Hasil Penelitian

3. Pembahasan

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Subjek C

1. Profil Subjek C

2. Hasil Penelitian

3. Pembahasan

BAB V: KESIMPULAN**A. Kesimpulan****B. Saran****DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**